

MANAJEMEN KESIAPAN KOGABWILHAN III DALAM MENGHADAPI ANCAMAN URBAN WARFARE DI PAPUA GUNA MENJAGA STABILITAS PERTAHANAN HIBRIDA

READINESS MANAGEMENT OF KOGABWILHAN III IN FACING URBAN WARFARE THREATS IN PAPUA TO MAINTAIN HYBRID DEFENSE STABILITY

Dyah Tribuwana Tungga Dewi¹, Susilo Adi Purwantoro², Pujo Widodo³

PRODI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA¹²³

Email:dyahtribuwana23@gmail.com¹, susilo.purwantoro@idu.ac.id²
pujowidodo78@gmail.com³

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika lingkungan strategis di Kawasan yang membawa arah geopolitik baru, dimana bila merefleksikan yang terjadi Di Rusia-Ukraina ancaman nonmiliter seperti separatism dapat dimobilisasi menjadi ancaman militer sehingga terjadi urban warfare. Oleh karena itu TNI sebagai leading sector pertahanan negara, membentuk Orgas baru yakni Kogabwilhan untuk memudahkan koordinasi tiga matra di daerah ketika ada perkembangan situasi konflik, sehingga reaksi dan integrasi antar satuan matra akan lebih efektif dan efisien. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini Kogabwilhan III dalam mengatur dan mempersiapkan wilayah gabungan dalam menghadapi ancaman. Guna mencapai tujuan manajemen pertahanan yang terintegrasi secara masif sehingga tercapainya stabilitas pertahanan hibrida, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akar dari segala ancaman yang berada di Papua adalah gabungan dari berbagai kompleksitas masalah IPOLEKSOSBUD yang dirasakan oleh masyarakat Papua. (2) Manajemen Pertahanan Kogabwilhan III dalam menjaga stabilitas pertahanan hibrida di wilayah Papua telah terpenuhi, namun harus lebih melibatkan unsur nirmiliter agar dapat menjaga aspek pertahanan hibrida. (3) Manajemen kesiapan Kogabwilhan III dalam mempersiapkan postur Pertahanan. Dalam konsep kesiapan Militer secara konseptual, moral dan fisik telah memenuhi aspek tersebut. Namun perlu ditingkatkan dalam aspek dukungan pemerintah. Sehingga terbentuk Sishankamrata. (2) Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam menjaga stabilitas pertahanan hibrida, aspek keselamatan masyarakat harus ditingkatkan guna ternetralisirnya ancaman-ancaman ideologi yang menjadi aspek radikal masyarakat Papua. Selain itu manajemen operasi yang disesuaikan dengan cluster ancaman direkomendasikan, guna menetralisir pengaruh radikal kelompok teroris berkarakter separatis di Papua guna menjaga stabilitas pertahanan hibrida.

Kata Kunci: Manajemen Pertahanan, Kesiapan, Urban Warfare, Pertahanan Hibrida

Abstract – This research is motivated by the dynamics of the strategic environment in the region which brings a new geopolitical direction, where if it reflects what is happening in Russia-Ukraine, non-military threats such as separatism can be mobilized into military threats resulting in urban warfare. Therefore, the TNI, as the leading sector of national defense, has formed a new Orgas, namely the Kogabwilhan to facilitate the coordination of the three dimensions in the regions when there is a development of a conflict situation so that reactions and integration between units of dimensions will be more effective and efficient. This study aims to analyze the current condition of Kogabwilhan III in managing and preparing joint areas in facing threats. To achieve the goal of massively integrated defense management to achieve hybrid defense stability, this research uses a qualitative approach with an analytical descriptive research design. The results of the study show

that: (1) The roots of all threats in Papua are a combination of the various complexities of IPOLEKSOSBUD problems that are felt by the people of Papua. (2) The Defense Management of Kogabwilhan III in maintaining hybrid defense stability in the Papua region has been fulfilled, but it must involve more non-military elements to maintain the hybrid defense aspect. (3) Kogabwilhan III readiness management in preparing the Defense posture. The concept of military readiness conceptually, morally, and physically fulfill these aspects. But it needs to be improved in the aspect of government support. Thus forming Sishankamrata. (2). The conclusion from this research is, in maintaining the stability of the hybrid defense, the aspect of public safety must be improved to neutralize ideological threats. In addition, operational management adapted to the threat cluster is recommended, to neutralize the influence of radical terrorist groups with a separatist character in Papua to maintain the stability of the hybrid defense.

Keywords: Defense Management, Readiness, Urban Warfare, Hybrid Defense.

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamis lingkungan strategis mempengaruhi ancaman yang terjadi di Kawasan. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yakni pembukaan UUD 1945, Pertahanan negara berperan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional yang terintegrasi secara massif. Oleh karena itu diperlukan sistem pertahanan hibrida untuk dapat mengantisipasi keduanya. Kompleksitas ancaman ini dinilai signifikan dan multidimensional, dimana sangat dipengaruhi oleh perubahan yang ancaman di lingkungan strategis, dan berimplikasi pada pertahanan negara.

Indonesia sejak dahulu merupakan negara dengan daya Tarik sumber daya yang melimpah, hal ini yang menjadikan Indonesia dijajah hingga ratusan tahun lamanya. Meski penjajahan secara terstruktur sudah angkat kaki dari NKRI, hingga kini Indonesia masih harus mewaspadai ancaman militer, nonmiliter hingga hibrida yang mengintai dari berbagai sektor. Ancaman ini berbanding lurus dengan tingginya potensi suatu daerah.

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sekaligus ancaman yang cukup tinggi bahkan permasalahan yang kompleks. Dapat dikatakan daerah dengan permasalahan paling kompleks. Akan tetapi, pada dasarnya, permasalahan-permasalahan di sana memiliki akar lain yang tidak seperti apa yang terlihat di permukaan. Jika dilihat, permasalahan-permasalahan Papua selalu dikaitkan dengan isu separatisme, rasialisme, sampai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Permasalahan-permasalahan tersebut sering menggiring Papua pada titik kulminasi bahwa Papua harus referendum.

Secara nasional, permasalahan Papua dibahas dalam wajah yang lain yang dikemas dengan sentimen bahwa masyarakat di Papua diklasifikasikan sebagai yang inferior. Selain itu, penjelasan alternatif sejarah mengenai aneksasi Indonesia oleh Papua, New York Agreement, dan pergolakan OPM di luar negeri mengenai HAM dan demokrasi, sampai tuntutan referendum untuk Papua.

Secara internasional, permasalahan Papua sering diangkat oleh negara-negara di Pasifik Selatan yang notabene negara-negara yang bergabung di Melanesia

Spearhead Group (MSG). Selain itu, pendirian sekretariat OPM di Oxford juga menjadi variabel lain yang menentukan dalam memahami permasalahan Papua. (Fajar F, 2018)

OPM semakin menguat sejak Reformasi 1998 hingga kini. Jika dilihat dulunya merupakan gerakan perlawanan yang terpecah-pecah, sekarang lebih solid dalam mengorganisir gerakan.

Tahun tersebut menjadi demarkasi politik nasional mengenai Papua. Sebab, tahun tersebut memiliki inti kebebasan berpendapat dan hal tersebut menjadi ruang bagi 'aktivisme' sebagian masyarakat Papua untuk mengartikulasi tujuan politiknya dan pada tahun yang sama, beberapa aktor baik individu dan kelompok di Papua mulai melakukan konsolidasi politik dan memberikan narasi alternatif mengenai permasalahan Papua, setidaknya historis (Viartasiwi, 2018).

Tentu, narasinya tetap mengkampanyekan hal yang sama, yaitu Free West Papua Campaign. Kelompok-kelompok gerakan yang mengkampanyekan narasi tersebut terbagi lagi oleh beberapa kelompok, baik yang bersenjata dan yang tidak bersenjata.

Di dalam negeri, gerakan Papua merdeka dimotori oleh elemen dari faksi politik (*unarmed*) seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan kelompok bersenjata (*armed*) yaitu Tentara Pembebasan Nasional OPM (TPN/OPM). Semenjak evolusi, gerakan yang membuat gerakan Papua Merdeka menjadi lebih terkonsolidasi, kampanye tersebut juga terjadi di luar negeri.

Diplomasi di luar negeri dimotori antara lain oleh *the Federal Republic of*

West Papua (FRWP), *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL), dan *National Parliament of West Papua* (NPWP).

Tidak hanya bermain dalam diplomasi dan forum Internasional, OPM yang sekarang diubah menjadi KSTP pun mulai kembali aktif menggerakkan kelompok-kelompok yang mendapatkan logistic senjata dari para missing actor. Kembali memanasnya separatisme yang terjadi di Papua merupakan ancaman hibrida yang mampu memantik secara fisik maupun ideologi ke arah pemisahan negara. (Wicaksana S, 2021)

Papua yang sejak lama menjadi point of interest dikawasan seolah menjadi sasaran empuk bagi *community* seperti AUKUS, QUAD, dan negara-negara ras Melanesian dapat menargetkan Papua. Separatisme, meski dapat dikatakan sebagai ancaman non militer, namun dalam prosesnya dan merefleksikan konflik ideologi yang dapat dimanfaatkan oleh states actor. Seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dimana agresi yang terjadi dipicu oleh Gerakan wilayah separatis Luhansk dan Donetsk dan meningkat eskalasi hingga kepada agresi militer.

Bukan tidak mungkin banyak pihak yang berusaha untuk memanfaatkan momentum separatisme dan menggerakkan para belligerent di Papua sebagai kendaraan untuk melakukan hal yang serupa, untuk itu, dibutuhkan sistem pertahanan terpadu untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara.

Dalam perkembangan lingkungan strategis yang cepat, baik internal maupun eksternal, dinamika ancaman menyerang dari berbagai sisi. Bahkan konsep

pertempuran konvensional secara fisik yang diprediksi akan berevolusi menjadi cyber war pun pecah oleh Rusia dan Ukraina, tidak hanya itu konsep urban warfare pun digunakan untuk menyerang sistem pemerintahan terpusat. Tidak berhenti pada perang perkotaan, sistem perang hibrida melalui perang Informasi, separatis, dan perang dagang pun juga dilakukan untuk saling melemahkan. (Anthony King, 2021).

Terjadinya *urban warfare* di Rusia-Ukraina dipicu sejak lama oleh beberapa hybrid aspect salah satunya oleh Gerakan Separatis Luhansk dan Donetsk, yang kemudian dikendarai oleh kepentingan lain. Merefleksikan terjadinya urban warfare di Rusia-Ukraina, perang diawali dengan letupan non tradisional yang sangat tipis, letupan-letupan kecil inilah merupakan ancaman nontradisional yang tidak terselesaikan dan teramankan dengan baik, sehingga perang hibrida yang sebelumnya dilakukan tanpa kekuatan militer beralih menjadi perang perkotaan yang mampu meluluhlantakkan sistem pemerintahan dan menghasilkan collateral damage. (Ljungkvist, K, 2022).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) sejak lama menjadi ancaman nontradisional Indonesia. KSTP yang kerap melakukan baku tembak dengan aparat TNI-Polri dalam beberapa tahun terakhir, menjadi ancaman militer dan ancaman nyata karena aksi separatisme tidak mengelakkan aksi penembakan dan memakan korban masyarakat sipil, dan mengancam kedaulatan wilayah teritorial Indonesia (Indrawan J, 2017)

Ancaman urban warfare dapat menjadi klimaks dari gerakan separatis yang mulai disusupi oleh state actor atas dasar HAM. Kesiapan untuk mengatasi permasalahan tersebut termasuk ke dalam urgensi dalam melakukan pembentukan dan pengelolaan sedini mungkin dari keseluruhan komponen negara untuk dipersiapkan jauh sebelum ancaman datang. Kewaspadaan tersebut termasuk ke dalam lingkungan strategis yang berubah-ubah dan dapat memberikan ancaman militer dan ancaman non militer beserta jenis-jenis didalamnya yang telah disebutkan pada Buku Putih Pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Melihat kondisi ancaman dalam skala regional dan global, TNI sebagai komponen utama pertahanan membentuk satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan. Pembentukan Kogabwilhan juga akan memudahkan koordinasi tiga matra di daerah ketika ada perkembangan situasi konflik, sehingga reaksi dan integrasi antar satuan matra akan lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Kogabwilhan sudah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya merevisi Perpres 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Kogabwilhan sendiri akan berada langsung di bawah komando Panglima TNI. Kogabwilhan merupakan representasi konsep interoperabilitas TNI dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks dan dapat

mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Oleh sebab itu penting untuk menerapkan manajemen pertahanan Kogabwilhan III sebagai satuan yang berperan untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis dan harus terintegrasi dengan baik dan mampu memberikan resolusi dalam menangani konflik yang terjadi sebagaimana fungsinya. Penekanan kesiapan dan pengelolaan harus ditelusuri dari berbagai aspek untuk dapat menemukan *trouble spot* ancaman baik actual maupun potensial. Sebagai faktor kesiapan pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan yang membutuhkan penelitian secara lebih lanjut untuk melihat kesiapan selama ini yang dimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Metode ini memiliki tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana (Neuman, 2014) dan bukan hanya digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan 'bagaimana', tetapi juga 'mengapa' dari topik yang diangkat melalui informasi acak yang dijadikan sebagai data, seperti transkrip dan rekaman wawancara, email, video, gambar, dan catatan. Pendekatan kualitatif juga menyediakan pemaparan komprehensif terkait apa yang menjadi

kesenjangan dari *das sein* dan *das sollen* yang timbul pada objek penelitian berdasarkan teori dan data yang diperoleh di lapangan. Untuk memperoleh data yang absah dilakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi data, sumber dan metode. (Neuman, W. Laurence, 2015)

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian terkait Manajemen Kesiapan Kogabwilhan III Dalam Menghadapi Ancaman Urban Warfare di Papua Guna Menjaga Stabilitas Pertahanan Hibrida ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, dan studi dokumen. Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan dari Kogabwilhan III, Mabes TNI dan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dan yang merupakan stakeholder utama dalam manajemen kesiapan Kogabwilhan III dalam menghadapi ancaman. Sebagai informan pendukung, peneliti melakukan wawancara dengan satuan-satuan perwakilan dari matra darat, laut dan udara yang melaksanakan tugas operasi di Papua maupun satuan organik yang berad di wilayah Kogabwilhan III. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi pada saat proses wawancara dan observasi berlangsung. Berikut adalah hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang telah dilakukan.

Kategorisasi ancaman di wilayah Kogabwilhan III

Akar dari segala ancaman yang berada di Papua adalah gabungan dari berbagai kompleksitas masalah yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Meskipun sejauh ini TNI mampu menstabilkan wilayah Papua dari ancaman militer, seperti mobilisasi Angkatan bersenjata oleh negara lain, baik dalam bentuk invasi, spionase dan sebagainya. Namun ancaman militer dapat dilihat dari aspek lain yakni Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Aksi bersenjata atas gejolak dalam negeri secara anarkis ini dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang kini diubah menjadi KTSP (Kelompok Teroris Bersenjata). Aksi ini secara clandestine didukung oleh negara tetangga di antaranya Melanesian states dan Australia. Tidak hanya itu, perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya mulai bergeser menggunakan senjata sehingga membahayakan keutuhan dan keselamatan bangsa.

Dari aspek geografis, karena berbatasan dalam satu daratan dengan Papua New Guinea menjadikan Papua menjadi daerah yang cukup rawan. Wilayah Alki III yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menjadi ancaman signifikan yang harus menjadi perhatian. Terlebih melihat arah geopolitik dunia mulai bergeser ke wilayah Indo Pasifik, sehingga membentuk aliansi baru seperti AUKUS dengan penggunaan Kapal selam bertenaga nuklir yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan laut Indonesia.

Dimana apabila disinyalir lebih mendalam, kehadiran AUKUS di wilayah merupakan, keterwakilan Amerika dan Inggris di Kawasan Asia Pasifik, yang mana dengan diadakannya Kerjasama tersebut, Amerika dan Inggris dapat dengan mudah mengadakan pelatihan militer di Kawasan. Jalur alki III yang dibuka sebagai akses transportasi laut pun dapat menjadi rawan oleh kapal- kapal militer UK, USA dan Australia.

Ancaman non-militer yang terjadi di wilayah Kogabwilhan III khususnya Papua dapat dikatakan benar-benar kompleks. Isu kemiskinan dan keterbelakangan menjadi isu yang sangat sulit untuk diselesaikan, bahkan setelah diadakannya otsus yang melibatkan putra daerah untuk secara langsung menjadi pemangku kebijakan. Faktanya hal itu tidak menyelesaikan permasalahan di masyarakat, banyak oknum pemerintah yang justru berusaha memperkaya diri sendiri dengan korupsi, penggelapan hingga melakukan money laundering melalui judi dan aktifitas ilegal lainnya. Beberapa oknum pemerintah Papua juga cenderung pro dengan Gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri.

Di Wilayah Kogabwilhan III ancaman hibrida berimplikasi besar terhadap pengambilan keputusan negara, baik pada level daerah, regional, negara, maupun institusi internasional. Aktor yang menjalankan aksi untuk memberikan ancaman hibrida ialah KTSP yang memiliki berbagai lini untuk kemudian menghadirkan ancaman bagi keutuhan bangsa, Aksi tersebut dinamakan aksi hibrida (*hybrid action*) dimana aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis ini terkoordinasi dan tersinkronisasi kepada

negara negara yang secara diam-diam mendukungnya. Seperti negara-negara Melanesian states yang selalu mendukung kemerdekaan Papua atas nama HAM, ataupun Australia yang diam-diam menjadi suaka bagi kelompok separatis, hingga memberi dukungan logistic.

Domain dari ancaman hibrida yang terjadi di Papua meliputi aspek politis, ekonomi, militer, maupun domain sistem informasi milik institusi negara maupun non-negara. Aksi hibrida ini dijalankan oleh KTSP melalui jalur militer secara terang-terangan hingga melalui jalur sosial politik secara diam-diam atau tidak terdeteksi yang dampak masif bagi target-target didalamnya.

KKB, KTSP merupakan ancaman aktual yang secara nyata membawa Papua dalam ketidakstabilan keamanan dan pertahanan. Kemudian tersinkronisasi dengan ancaman- ancaman nonmiliter dari aspek Merefleksikan Perang Rusia dan Ukraina yang salah satu kendaraannya adalah kelompok separatis. Indonesia harus segera mempersiapkan diri dengan memperkuat Komando gabungan wilayah pertahanan. Krisis pangan dan resesi di 2023 yang mengancam dunia ini menjadikan arah geopolitik dunia bergeser di Kawasan Asia Pasifik.

Mengatasi Ancaman potensial yang mungkin terjadi di Papua yakni civil war, invasion dan urban warfare. Ancaman (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive* (CBRNE), dan perang informasi belakangan juga menjadi trend yang menjadi perhatian pertahanan dan keamanan negara-negara dunia (Sebastian E,2018).

Ancaman tersebut berpotensi terjadi disebabkan oleh gejolak ancaman actual yang kemudian bertransformasi menjadi kendaraan bagi states actor atau nonstates actor untuk melancarkan misinya. Dalam case yang terjadi di Indonesia, ancaman urban warfare menjadi ancaman berpotensi, bila aparat dan pemerintah tidak mampu mengatasi gejolak separatism yang mulai berdiplomasi mencari suaka di negara tetangga, dengan misi memisahkan Indonesia dengan Papua hingga dapat berkuasa di Kawasan.

Ditambah dengan faktor manusia, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi menjadikan ancaman di wilayah ini jauh lebih rumit. Akumulasi dari berbagai ancaman inilah yang kemudian menjadi ancaman disintegrasi. Ancaman disintergrasi yang terjadi di Papua saat ini, dan sebenarnya terus terjadi, adalah persoalan rumit yang melibatkan begitu banyak faktor.

Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas, serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apalagi konflik berdimensi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, seperti penyeragaman identitas budaya dan pemerintahan lokal, serta pendekatan keamanan represif yang sering diterapkan pemerintah pusat, merupakan ancaman besar terhadap cultural cohesiveness Papua, dan tentunya external peace and harmony Indonesia secara umum. Jadi sekali lagi, ancaman terhadap keamanan nasional di Papua sebenarnya bukan sekadar konflik bersenjata (militer), tetapi juga ancaman non-militer.

Pembangunan kebijakan yang berskala nasional, seperti UU Otsus, harus memiliki paradigma pendekatan keamanan yang berorientasi pada kesejahteraan (*people centered*). Dalam perspektif politik multikultural, kenyataan itu tak masalah. Dalam konteks negara multibangsa, tak ada alasan logis buat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman terhadap keamanan nasional di Papua seharusnya dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Papua itu sendiri.

Kogabwilhan III sebagai Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, harus mampu mengadakan operasi sesuai dengan klasifikasi ancaman, sejauh ini ancaman yang signifikan adalah ancaman separatism tidak hanya menyerang secara fisik menggunakan senjata namun juga ideologi.

Manajemen Pertahanan Kogabwilhan III dalam Menjaga Stabilitas Pertahanan Hibrida.

Manajemen Pertahanan Kogabwilhan III saat ini telah memenuhi serangkaian proses dalam fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian namun pada setiap prosesnya masih menemui kendala. Tahapan yang dilakukan oleh Kogabwilhan III adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan adalah suatu keharusan dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan lembaga tersebut. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan,

dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang. (Robbins, 2001)

Dalam Perencanaan yang dilakukan oleh Kogabwilhan III selalu mengacu dengan peraturan, berpedoman kepada Pancasila, 8 wajib TNI dan Sapta Marga. Adapun dalam perencanaan untuk menghadapi kehadiran Kelompok Separatis Teoris Papua terdapat tiga pendekatan utama yang dilakukan, pendekatan hukum dimana kekerasan dianggap sebagai pidana yang mengacu pada pengaturan di KUHP yang meletakkan Polri sebagai leading sector. Kedua, pendekatan militer yang melihat ancaman terror di Papua berasal dari kelompok separatis. Karena dianggap mengancam integritas territorial bangsa, maka pemerintah dapat menggelar operasi militer selain perang sesuai dengan pasal 7 UU TNI. Ketiga, pendekatan keamanan yang memadukan KUHP dengan Undang-undang yang lebih spesifik terutama undang-undang antiterror, territorial, intelejen dan kepolisian. Kogabwilhan sebagai Gunkuat merencanakan pemberangkatan pasukan satgas BKO yang akan melakukan tugas operasi di Papua sesuai dengan kebutuhan dan ancaman.

2. Tahap pengorganisasian, menurut (Arikunto,2008) pengorganisasian adalah pembagian tugas atau pekerjaan, pembidangan, pengunitan, yaitu: macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, banyaknya orang yang terlibat dalam organisasi, dan kemampuan,

minat, bakat yang berbeda terhadap pekerjaan. Secara pengorganisasian, Kogabwilhan berada di alur komando gunkuat. Dimana berbeda dengan peran binkuat sebagai Kotama pembina. Pangkogabwilhan III merupakan panglima tertinggi di wilayah Kogabwilhan III namun kepemilikan pasukan terdapat pada Pangkotama. Satuan penugasan, Bawah Kendali Operasi secara organisasi berada di bawah Kogabwilhan sebagai Gunkuat. Kogabwilhan III dalam hal ini dibantu oleh Binkotama setempat yang berperan sebagai fungsi pengawasan.

Kehadiran Kogabwilhan yang cukup baru menjadikan Kogabwilhan secara operasional belum dapat melaksanakan pengorganisasian di wilayahnya sendiri, dimana sarana dan prasarana belum tersedia, belum adanya markas komando juga menjadikan Pangkogab beserta jajarannya harus mengorganisasikan pasukan di Papua melalui jarak jauh, yakni di Markas Besar TNI, ketidaktersediaanya pasukan langsung di bawah Kogabwilhan juga di bawah Kogabwilhan, menjadikan fungsi pengorganisasian kurang optimal.

3. Dalam aspek pengarahan, setiap jabatan yang terdapat di Kogabwilhan telah melalui pengamatan oleh para pimpinan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan personel, dengan mengintegrasikan tiga matra terpadu guna adanya delegasi atau terkewakilan dari unsur ketiga matra, yakni Darat, Laut dan Udara. Pengarahan juga diterapkan kepada batalion satgas di Papua dengan menyesuaikan gelar dan kemampuan pasukan sesuai dengan wilayah satgas pengamanan masing-masing.

Pengarahan diterapkan kepada satgas di Papua dengan menyesuaikan gelar dan kemampuan pasukan sesuai dengan wilayah satgas pengamanan masing-masing. Kogabwilhan berperan untuk menstimulasi kembali kepada pasukan bahwa wilayah penugasan, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan menghimbau pasukan untuk selalu siaga.

4. Proses Pengkoordinasian yang terjadi di Kogabwilhan III dengan cara mengkoordinasikan seluruh unit dari berbagai tingkatan untuk senantiasa menyatu. Setiap titik rawan di Papua selalu terdapat agen Badan Intelijen Strategis dan Badan Intelijen Negara yang kemudian mampu menganalisa potensi-potensi ancaman dan melaporkannya kepada Pangdam selaku kotama pembina, kemudian Pangdam melaporkannya secara hirarki kepada Pangkogabwilhan dan kepala staff, yang kemudian menginformasikannya kepada Panglima TNI dan Panglima tertinggi Indonesia yakni Presiden. Pengkoordinasian dilakukan bottom up dan top down, dimana komandan penugasan melaporkan situasi, kondisi dan medan kepada pimpinan. Selain itu pengkoordinasian juga dilakukan apabila terjadi case yang membutuhkan pengambilan keputusan. Jalur komunikasi secara birokrasi cukup berjenjang, namun dimudahkan dengan kehadiran teknologi.

5. Tahapan pengendalian merupakan peran utama bagi Kogabwilhan, fungsi tersebut dilakukan melalui pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam tahapan ini memiliki nilai manfaat untuk memastikan bahwa setiap perencanaan telah dijalankan sesuai untuk dievaluasikan,

sehingga Kogabwilhan III mampu memberikan solusi kepada setiap permasalahan terhadap hal-hal yang menyimpang dari organisasi dan masalah tersebut dinilai besar dan signifikan. Tidak hanya pengendalian terhadap perencanaan, pengendalian juga dilakukan kepada personel, alutsista, gelar pasukan dan kekuatan militer, sehingga seluruh komponen pertahanan yang berada di Kogabwilhan III selalu dalam kendali, untuk menjaga stabilitas pertahanan negara.

Manajemen Kesiapan Kogabwilhan III dalam Menghadapi Ancaman Urban Warfare.

Kehadiran Kogabwilhan adalah untuk menjawab tantangan global. Dimana bila para pakar sebelumnya menyatakan bahwa perang fisik tidak akan lagi dilaksanakan, akan tetapi hanya akan berganti kepada perang IPOLEKSOSBUD, namun seolah mematahkan statement tersebut, perang Rusia dan Ukraina pun terjadi. Ukraina yang mulai berkiblat pada arah geopolitik Amerika dan negara-negara anggota NATO seakan tidak memperhitungkan bahwa Rusia mampu memobilisasi para kelompok separatis, yang kemudian dijadikan pintu oleh Rusia sebagai pintu terjadinya perang.

Menyikapi fenomena, dan kesiapan dalam perubahan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara efektif dan efisien. Dari kesiapan tersebut, dapat dilihat terdapat banyak fungsi, peran pokok yang tidak dapat dipisahkan dari komponen manajemen dan pengelolaan terpadu.

Dalam konsep kesiapan Militer dalam operasi, elemen elemen utama yang

dibutuhkan terbagi atas Military Power sebagai atap pelindung yang disokong oleh 3 pilar utama, yakni *Conceptual Component*, *Moral Component*, *Physical Component*. Dengan berpondasikan *Whole of Government Approach* (Malinowski, 2016).

Dalam aspek kekuatan Militer, penulis mendeskripsikan kekuatan berdasarkan Global fire power yang mana berdasarkan komponen dan aspek-aspek yang mempengaruhi kekuatan militer Indonesia berada di ranking 13 dari 145 negara yang terdata dengan klasifikasi 34 aspek dalam kategori *excellent*, 9 aspek dalam kategori *good*, 2 *average*, 3 *fair* dan 5 aspek dalam kategori *poor*. Maka dalam aspek Kekuatan Militer, Indonesia siap dalam menghadapi ancaman.

Secara konseptual komponen yang mendasari penggelaran kekuatan pertahanan, Prinsip doktrin yang dipegang oleh Indonesia adalah Doktrin Pertahanan Negara yang merupakan dasar dalam mengembangkan Strategi Pertahanan Negara, pembangunan Postur Pertahanan Negara dan Penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara. Adapun implementasinya pada Kogabwilhan III sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya merevisi Perpres 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Kogabwilhan sendiri akan berada langsung di bawah komando Panglima TNI. Kogabwilhan merupakan representasi konsep interoperabilitas TNI dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks dan dapat mengancam

keamanan dan kedaulatan negara. (Markas Besar TNI, 2010).

Pada dasarnya system pertahanan Indonesia adalah Sishankamrata yang melibatkan seluruh komponen bangsa apabila terjadi perang, dimana TNI sebagai komponen utama sebagai leading sector, didukung oleh komponen pendukung dan komponen cadangan. Oleh karena itu nilai kesadaran bela negara yang harus dimiliki setiap warga negara. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2021).

Bila ditinjau dari Moral Komponen aspek psikologis dan budaya yang dapat menjadi penentu keberhasilan fighting power. Setiap bangsa tentu memiliki nilai-nilai moral yang menjadi prinsip dasar dalam membela negara. Jati Diri Bangsa adalah identitas suatu bangsa. Cita-cita Bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepentingan Nasional adalah tetap tegaknya NKRI.

Dan jika dikaji secara riil, komponen secara fisik dapat merealisasikan Kekuatan militer dalam operasi atau pertempuran. Komponen fisik sangat mempengaruhi daya tempur dimana aspek kuantitas dan kualitas menjadi factor penentu. Seluruh unsur penentu komponen fisik mampu memenuhi kesiapan, meski harus dikaji lebih mendalam apakah kemudian unsur-unsur tersebut merupakan gambaran secara menyeluruh atau hanya sekadar percontohan saja.

Setelah membahas aspek kekuatan militer sebagai Atap pelindung dan tiga komponen di atas sebagai pilar yang berfungsi untuk menegakkan kekuatan militer tersebut, maka dibutuhkan peran seluruh pemerintah sebagai pondasi dalam

membentuk kesiapan dalam menghadapi ancaman.

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, yakni usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pribadi. konsep Sishankamrata inilah yang melibatkan seluruh komponen negara untuk berkewajiban menjaga NKRI.

Apabila sewaktu-waktu terjadi perang maka negara pada posisi siap. Akan tetapi sejatinya Indonesia sejak merdeka pada 1945, ancaman dari negara lain dalam bentuk konflik bersenjata tidak dirasakan. Nonstate actor yang justru mewarnai konflik bersenjata, seperti Timor-timor yang kemudian melepaskan diri, Aceh yang saat itu dikuasai oleh GAM namun dapat dinetralisir melalui darurat militer hingga diplomasi, Poso, 1998, konflik Ambon dan lainnya. Ancaman yang terjadi di Indonesia banyak terjadi seperti konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah, atau horizontal mengenai suku dan agama. Hal ini yang menjadikan konsep operasi di Papua lebih landai dan minim dari penggelaran pasukan untuk urban warfare. Berbeda dengan wilayah Kogabwilhan I yang kerap melakukan penggelaran pasukan guna pelatihan di Natuna, karena ancaman langsung berasal dari luar yakni di Kawasan Laut China Selatan.

Meski demikian Kogabwilhan III sebagai orgas yang berfungsi untuk mengatasi dinamika lingkungan strategik, harus mempersiapkan pasukan sedini mungkin, melihat tren geopolitik saat ini penuh dengan ketidakpastiaan. Sehingga saat worst case Indonesia diserang, dengan konsep urban warfare maka negara selalu dalam kondisi siap.

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

Kategorisasi ancaman di wilayah Kogabwilhan III terbagi menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer, kemudian kedua ancaman tersebut saling beririsan dan membentuk ancaman multidimensional/hibrida, aspek ancaman hibrida ini pulalah yang menghadirkan ancaman aktual dan ancaman potensial. Manajemen Pertahanan Kogabwilhan III dalam menjaga stabilitas pertahanan hibrida di wilayah Papua adalah dengan melakukan implementaasi fungsi manajemen telah diterapkan, namun terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan guna menyesuaikan trouble spot ancaman.

Manajemen kesiapan Kogabwilhan III dalam mempersiapkan postur Pertahanan dalam menghadapi ancaman Urban Warfare. Dalam konsep kesiapan Militer dalam operasi, telah memenuhi aspek tersebut, namun dapat ditingkatkan sesuai dengan dinamika ancaman.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasinya sebagai berikut :

- a. Bagi Kogabwilhan III, Membentuk Rencana Operasi yang disesuaikan dengan cluster ancaman dan kapasitas personel, sehingga dapat

mencapai trouble spot central of gravity. Aspek keselamatan masyarakat sipil atau Orang asli Papua yang pro terhadap pemerintah harus ditingkatkan guna mencegah OPM melakukan penyusupan melalui pengaruh ideologi separatis.

- b. Mabes TNI, Membentuk konsep Grand desain operasi yang mengelaborasi antara unsur militer dan nonmiliter yang dapat menjadi pedoman bagi TNI khususnya Kogabwilhan dalam melakukan pelatihan dan penggelaran pasukan sesuai dengan kebutuhan akan ancaman yang dihadapi.
- c. Bagi Kementerian Pertahanan RI, Memberikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Melakukan sinergitas dengan setiap instansi juga merumuskan kebijakan guna meningkatkan stabilitas pertahanan.
- d. Universitas Pertahanan RI, Dapat melanjutkan dan memperdalam penelitian, serta menyusun konsep strategis yang berguna bagi pertahanan negara.

Pembatasan pada penelitian ini adalah Manajemen Pertahanan dan Kesiapan tidak menilai dari aspek kesiapan pasukan secara kuantitatif serta kemampuan daya tempur secara rill, sehingga dapat diteruskan oleh penelitian selanjutnya sebagai masukan demi meningkatkan kesiapan pasukan dalam menghadapi ancaman guna menjaga stabilitas pertahanan negara.

Daftar Pustaka

- Anthony King. (2021) *Urban Warfare in the Twenty-first Century*. Cambridge Polity.
- Arikunto, Suharsimi. (2008). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fajar, F. (2018). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Perbatasan Indonesia Papua New Guinea dalam Mendukung Pertahanan Negara*. Fayol, Henry. *General and Industria Management*. diterjemahkan oleh Constance Storrs, London: Ravenoi Books, 2016.
- Indrawan, J. (2017). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 159–173.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Dokumen Sishankamrata Abad 2021*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Ljungkvist, K. (2022). A New Horizon in Urban Warfare in Ukraine. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 5(1).
- Markas Besar TNI. (2010). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (Tridek)*. Jakarta: Staf Umum TNI.
- Malinowski, P. (2016). *Canadian Model of Military Leadership as a Successful Mixture of Civilian and Military Experiences*. Canada: *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*.
- Neuman, W. Laurence (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 merevisi Perpres 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI
- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8. Jakarta: Prenhallindo.
- Sebastian, E. (2018). *Meningkatkan Peran SDM Bela Negara Dalam Menghadapi Ancaman Perang generasi Keempat*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Viartasiwi, Nino. (2018) *The Politics of History in West Papua – Indonesia Conflict*. *Asian Journal of Political Science*. Routledge Taylor & Francis Group
- Wicaksana, S. W. (2021). *Analisis Strategi Desekritisasi Indonesia di Papua dan Papua Barat Dalam Perspektif Manajemen Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara* .